

Evaluasi Laporan Keuangan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun 2024 di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah

Olla Laudice Ayemi^{*}, Yoel Pasae², Johannes Baptista Halik³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

olla82ayemi@gmail.com^{*}

^{*}Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi laporan keuangan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengumpulan dan verifikasi bukti transaksi, hingga penyusunan laporan akhir yang disesuaikan dengan regulasi terbaru. Proses penyusunan SPJ mencakup perencanaan kegiatan, pencatatan transaksi oleh bendahara, verifikasi internal, hingga pengajuan dan evaluasi berkala. Evaluasi laporan keuangan melalui SPJ dilakukan dengan pemeriksaan administratif, validasi bukti transaksi, verifikasi kesesuaian anggaran, serta rapat koordinasi untuk menindaklanjuti temuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antarpegawai, pemanfaatan sistem digital, serta kepatuhan pada regulasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan prosedur pengelolaan SPJ sebagai upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kata kunci: Evaluasi, laporan keuangan, akuntabilitas, transparansi, surat pertanggungjawaban (SPJ).

Abstract

This study aims to evaluate the financial reporting process through Accountability Reports (Surat Pertanggungjawaban/SPJ) for the 2024 fiscal year at the Department of Environment, Forestry, and Land Affairs of Central Papua Province. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted descriptively through the stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the preparation of financial reports involves several stages, including budget planning, activity implementation, collection and verification of supporting documents, and final reporting in compliance with updated regulations. The SPJ preparation process includes activity budgeting, transaction recording by the treasurer, internal verification, submission for fund disbursement, and periodic evaluations. Evaluation of financial reports through SPJ is carried out by examining administrative completeness, validating supporting evidence, verifying budget-realization alignment, and conducting coordination meetings to address discrepancies. This study highlights the importance of staff coordination, the adoption of digital systems, and compliance with regulations to strengthen transparency and accountability in public financial management. The results provide practical recommendations for improving SPJ management procedures as part of advancing good governance practices.

Keywords: Evaluation, financial report, accountability, transparency, accountability report (SPJ).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan instrumen vital dalam tata kelola keuangan publik karena berfungsi sebagai bukti akuntabilitas atas penggunaan anggaran. Implementasi SPJ yang akurat, tepat waktu, dan sesuai regulasi sangat penting untuk memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam praktiknya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan daerah masih rendah. Misalnya, transparansi pengelolaan keuangan daerah Indonesia berdasarkan informasi di situs resmi pemerintah menunjukkan tingkat rendah rata-rata hanya sekitar 16,84 %. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, terutama di tingkat pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah menggagas kerangka hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Namun, meningkatnya regulasi tidak selalu diikuti oleh kesiapan implementatif dalam lembaga pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan SPJ yang efektif dan transparan.

Tabel berikut menggambarkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan di beberapa provinsi sebagai ilustrasi latar:

Tabel 1. Indeks transparansi pengelolaan keuangan Daerah di Indonesia

Provinsi	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan
Semua provinsi (rata-rata)	16,84 %
Provinsi dengan indeks tertinggi	± 50 % (Provinsi Jawa Tengah)
Provinsi dengan indeks terendah	± 3,45 % (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat)

Sumber: Data diadaptasi dari Mahsun, Firdaus, & Haryanto (2016).

Fenomena ini menegaskan bahwa kendati ada kerangka regulasi yang mendorong keterbukaan, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal—SPJ masih rentan terhadap keterlambatan, ketidaktepatan data, atau kurangnya verifikasi, yang berdampak pada

kredibilitas pelaporan keuangan dan potensi pengawasan publik.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini menjadi sangat penting karena menyentuh inti tata kelola keuangan publik: bagaimana SPJ dapat dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan meningkatnya tuntutan publik, audit oleh lembaga seperti BPK, dan dorongan digitalisasi sistem keuangan publik, memfokuskan analisis pada SPJ adalah langkah strategis untuk memperkuat mekanisme good governance. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konkret dalam meningkatkan kualitas prosedur SPJ dan mendukung perbaikan sistem pelaporan keuangan publik di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dilakukan di instansi yang diteliti?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan dan pengelolaan SPJ tersebut?
3. Bagaimana upaya atau praktik terbaik yang dapat ditingkatkan dalam prosedur SPJ untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas?

TINJAUAN LITERATUR

Grand Theory: Akuntabilitas Publik dan Good Governance

Penelitian ini berlandaskan pada teori akuntabilitas publik yang menekankan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan, dapat diaudit, dan sesuai dengan prinsip demokrasi (Bovens, 2019). Dalam kerangka good governance, akuntabilitas dan transparansi dipandang sebagai pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (OECD, 2017). Instrumen akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang memungkinkan publik maupun auditor menilai kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian telah mengkaji kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Agustina (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi, dan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Rakhman (2024) menambahkan bahwa kualitas laporan keuangan juga terkait dengan kualitas institusional dan kondisi sosial-ekonomi.

Dalam konteks transparansi, penelitian oleh Kawedar dan Sutaryo (2022) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah masih rendah dan dipengaruhi faktor politik, kapasitas birokrasi, dan komitmen pimpinan daerah. Bintang, Nugraha, dan Nugroho (2023) mengulas efektivitas penyusunan SPJ pada Komisi Pemilihan Umum dan menemukan kendala berupa keterlambatan pengumpulan bukti transaksi serta perubahan regulasi. Sementara itu, Herdiana (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi SPJ dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan kapasitas SDM.

Definisi Operasional Konsep Kunci

1. Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang menyajikan posisi keuangan dan realisasi anggaran pemerintah daerah dalam satu periode sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Setyaningrum & Syafitri, 2021).
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan laporan rinci penggunaan anggaran yang dilengkapi bukti pengeluaran untuk menunjukkan akuntabilitas setiap kegiatan (Putri & Anggraeni, 2021).
3. Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan informasi keuangan publik yang dapat diakses masyarakat luas dan mudah dipahami (Kawedar & Sutaryo, 2022).
4. Akuntabilitas adalah kewajiban pengelola anggaran untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan hasil penggunaan dana publik (Bovens, 2019).
5. Digitalisasi SPJ mengacu pada penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi dalam input, verifikasi, dan pelaporan yang terbukti meningkatkan efisiensi (Herdiana, 2024).

Analisis Temuan dan *Research Gap*

Literatur terdahulu secara konsisten menunjukkan pentingnya kompetensi SDM, sistem akuntansi, dan tindak lanjut audit dalam menentukan kualitas laporan keuangan daerah (Agustina, 2020; Rakhman, 2024). Studi lain menyoroti bahwa transparansi masih dipengaruhi oleh faktor politik dan kelembagaan (Kawedar & Sutaryo, 2022). Sementara penelitian tentang SPJ menemukan kendala administratif dan teknis yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan (Bintang et al., 2023).

Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian bersifat kuantitatif dengan fokus pada faktor determinan kualitas laporan keuangan, sedangkan kajian kualitatif mengenai proses operasional SPJ relatif terbatas. Kedua, penelitian tentang digitalisasi SPJ masih sedikit, khususnya dalam konteks daerah baru atau wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti Papua Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mendalam tentang praktik penyusunan dan evaluasi SPJ sebagai instrumen akuntabilitas publik di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses penyusunan dan evaluasi laporan keuangan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial secara lebih komprehensif dan kontekstual, terutama terkait dinamika internal, kendala, serta strategi evaluasi SPJ dalam praktik sehari-hari (Creswell & Creswell, 2018). Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fakta, sifat, dan hubungan antarfenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. Karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu seperti pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, staf bagian

keuangan, serta pihak terkait yang memiliki pengetahuan langsung mengenai proses penyusunan SPJ (Etikan & Bala, 2017). Pemilihan teknik ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan kedalaman informasi daripada jumlah sampel.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian Provinsi Papua Tengah, dengan waktu penelitian berlangsung dari Januari hingga April 2024. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena dinas tersebut merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran signifikan dan aktivitas program berbasis lingkungan, sehingga menuntut pengelolaan SPJ yang transparan dan akuntabel. Konteks Papua Tengah yang merupakan provinsi baru juga memberi signifikansi penelitian ini, mengingat masih terbatasnya kajian mengenai tata kelola keuangan di wilayah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata terkait alur penyusunan SPJ, sementara wawancara mendalam dengan informan kunci dilakukan untuk memahami pengalaman, kendala, dan strategi yang digunakan dalam proses pelaporan. Dokumentasi difokuskan pada telaah dokumen SPJ, laporan keuangan, serta peraturan terkait, guna memperoleh data pendukung yang akurat (Miles et al., 2019).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data lapangan sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan pemahaman hubungan antar konsep. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang dengan memeriksa konsistensi temuan di lapangan dan validasi dengan sumber data lain. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian terdiri dari lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Lingkungan

Hidup, Kehutanan, dan Pertanian Provinsi Papua Tengah, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, staf Subbagian Keuangan, auditor internal, serta Kepala Bidang Teknis. Usia responden berkisar antara 30–50 tahun, dengan pengalaman kerja rata-rata di atas lima tahun dalam pengelolaan administrasi keuangan. Latar belakang pendidikan mayoritas adalah ekonomi dan akuntansi, sedangkan sebagian lainnya berasal dari administrasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kompetensi yang memadai untuk memahami proses penyusunan dan evaluasi SPJ.

“Proses penyusunan SPJ tidak hanya sekadar mengumpulkan bukti, tetapi memastikan dokumen sesuai aturan yang seringkali berubah” (Hasil Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran, Maret 2024).

“Koordinasi antarbidang sangat penting, karena jika satu unit terlambat, maka laporan keseluruhan ikut tertunda” (Hasil Wawancara dengan Staf Subbag Keuangan, Maret 2024).

Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan di Dinas dimulai dari pencatatan transaksi oleh bendahara, verifikasi dokumen pendukung oleh pejabat terkait, hingga penyusunan laporan bulanan dan tahunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pengumpulan bukti dari unit pelaksana kegiatan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Agustina (2020) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen merupakan determinan penting kualitas laporan keuangan daerah.

Proses Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

SPJ disusun berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini dilengkapi dengan kwitansi, daftar hadir, foto kegiatan, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Proses penyusunan SPJ masih menghadapi beberapa kendala, terutama perubahan regulasi dan keterbatasan pemahaman staf terhadap aplikasi berbasis digital.

“Kadang aturan berubah di tengah jalan, misalnya terkait format SPJ. Kami harus menyesuaikan lagi laporan yang sudah dibuat” (Hasil Wawancara dengan PPK, Maret 2024).

Hal ini sejalan dengan temuan Bintang, Nugraha, dan Nugroho (2023) yang menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan keterlambatan pengumpulan bukti sering menghambat penyusunan SPJ.

Evaluasi SPJ dan Laporan Keuangan

Evaluasi SPJ dilakukan melalui rapat koordinasi rutin antarbidang yang berfungsi memeriksa kelengkapan bukti, mencocokkan realisasi anggaran dengan perencanaan, serta mengidentifikasi kendala administratif. Evaluasi ini berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.

“Lewat rapat evaluasi bulanan, kami bisa mengetahui kendala tiap bidang, misalnya bukti yang belum lengkap, sehingga bisa segera dicari solusi” (Hasil Wawancara dengan Auditor Internal, April 2024).

Temuan ini mendukung Herdiana (2024) yang menekankan bahwa digitalisasi dan evaluasi berkala dapat memperbaiki efektivitas pertanggungjawaban keuangan.

Pembahasan

Hasil penelitian menjawab rumusan masalah penelitian:

1. Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai regulasi, namun menghadapi kendala teknis berupa keterlambatan dokumen.
2. Penyusunan SPJ melibatkan pencatatan, verifikasi, dan pelaporan, dengan tantangan utama berupa perubahan regulasi dan keterbatasan pemahaman digital.
3. Evaluasi SPJ dilaksanakan melalui rapat koordinasi lintas bidang, yang terbukti memperkuat transparansi dan akuntabilitas laporan.

Secara teoretis, temuan ini mendukung teori akuntabilitas publik (Bovens, 2019) yang menekankan bahwa mekanisme pelaporan merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Secara empiris, hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Agustina, 2020; Kawedar & Sutaryo, 2022) yang menekankan pentingnya kompetensi SDM dan sistem akuntansi. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti aspek operasional SPJ di provinsi baru, yaitu Papua Tengah, yang menghadapi tantangan unik terkait adaptasi regulasi dan keterbatasan infrastruktur.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2024 di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian ini berhasil menjawab tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni mengidentifikasi tiga aspek utama:

1. Proses penyusunan Laporan Keuangan: Dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengumpulan bukti transaksi, pencatatan keuangan, penyusunan SPJ, rekapitulasi, hingga evaluasi laporan.
2. Proses penyusunan SPJ 2024: Meliputi tahap perencanaan anggaran, pengumpulan bukti, pencatatan transaksi oleh bendahara, penyusunan berkas SPJ, verifikasi oleh tim keuangan, pengajuan SPJ untuk pencairan dana, hingga evaluasi berkala.
3. Langkah-langkah evaluasi Laporan Keuangan melalui SPJ: Meliputi pengumpulan dan inventarisasi dokumen, pemeriksaan kelengkapan, verifikasi kesesuaian anggaran, validasi bukti transaksi, identifikasi temuan, perbaikan dokumen, rapat evaluasi, dan finalisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan dan SPJ di DLHKP Provinsi Papua Tengah telah dilaksanakan secara terstruktur dan berorientasi pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan sistem digital berbasis aplikasi juga telah mendukung efisiensi kerja, meskipun di awal penerapannya terdapat tantangan dan penyesuaian.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan data dan analisis yang dapat digunakan oleh manajemen dinas untuk pengambilan keputusan terkait perencanaan anggaran dan program lingkungan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif untuk memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan SPJ.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana laporan keuangan yang disusun melalui SPJ dapat memengaruhi akuntabilitas keuangan di instansi pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan pengelolaan lingkungan, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel di DLHKP Provinsi Papua Tengah berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat

tercipta pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel, sejalan dengan konsep *good governance*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dan masalah dalam penyusunan dan pengelolaan SPJ di DLHKP Provinsi Papua Tengah, seperti kurangnya pemahaman pegawai tentang regulasi yang berlaku, kesulitan dalam pengumpulan data yang diperlukan, serta potensi penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam menerapkan sistem yang terintegrasi dan efektif untuk memantau penggunaan anggaran. Keterbatasan ini menjadi fenomena penting yang mendasari perlunya evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Bintang, A., Nugraha, A., & Nugroho, D. (2023). Efektivitas Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Komisi Pemilihan Umum.
- Bovens, M. (2019). *Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and Sampling Methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), 215–217.
- Herdiana, Y. (2024). Digitalisasi Arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Direktorat Keuangan Universitas Gadjah Mada.
- Herdiana, Y. (2024). Digitalisasi Arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Direktorat Keuangan Universitas Gadjah Mada.
- Kawedar, W. A., & Sutaryo, A. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.
- Mahsun, M., Firdaus, A., & Haryanto, T. (2016). Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Transparansi.
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2017). *Recommendation of the Council on Open Government*. OECD Legal Instruments.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 108–119. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738>
- Putri, A., & Anggraeni, T. (2021). *Buku Panduan Mekanisme Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ)*. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Rakhman, A. (2024). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Alami Peningkatan.
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2021). Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310.
- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPSTP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.